

**PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA
PERANGKAT NAGARI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
NAGARI DI KECAMATAN SUNGAYANG KABUPATEN
TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Administrasi Publik FIS UNP
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

RATU NOVIA

NIM.14042031/2014

**PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perangkat
Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di
Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar

Nama : Ratu Novia

Nim/TM : 14042031/2014

Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 05 Februari 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D.
NIP. 19630401198903 1 003

Pembimbing II



Dra. Jumiati, M.Si
NIP. 19621109198602 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, Tanggal 30 Januari 2018 Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

**Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam
Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah
Datar**

Nama : Ratu Novia
NIM : 14042031
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 05 Februari 2018

Tim Penguji

Nama	
1. Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
2. Sekretaris	: Dra. Jumiati, M.Si,
3. Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
4. Anggota	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si
5. Anggota	: Zikri Alhadi, S.IP, MA

Tanda Tangan

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 1 1989 1 002

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratu Novia

NIM / TM : 14042031/ 2014

Tempat / Tanggal Lahir : Pasar Lakitan / 02 November 1996

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 05 Februari 2018

Yang membuat pernyataan



Ratu Novia

14042031/2014

ABSTRAK

RATU NOVIA : NIM 2014/14042031 Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah karena masih terdapat motivasi kerja perangkat nagari yang rendah dalam pengelolaan keuangan nagari.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh perangkat nagari yang ada di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari sekretaris nagari, bendahara nagari dan lima kepala urusan nagari. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 32 responden yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan pengambilannya dilakukan melalui teknik *Simple Random Sampling*. Data penelitian ini dikumpulkan melalui angket dengan pengukuran skala likert. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan uji regresi linear sederhana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan dengan nilai signifikansi 0,000 dan nilai *Adjusted R Square* 0,685. Hal ini berarti pengaruh variabel motivasi kerja terhadap kinerja dalam pengelolaan keuangan sebesar 68,5%. Sedangkan sisanya 31,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang dikemukakan antara lain agar perangkat nagari, khususnya yang ada di kecamatan sungayang, agar lebih meningkatkan lagi motivasi kerja dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai kategori “sangat tinggi” sehingga terciptanya pengelolaan keuangan nagari yang maksimal dan tepat sasaran.

Kata Kunci : Motivasi Kerja, Kinerja, Pengelolaan Keuangan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar”**.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dra. Jumiati., M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Syamsir., M.Si, Ph.D.selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Jumiati., M.Si, selaku pembimbing II.
4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si., Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si. dan Bapak Zikri Alhadi SIP., MA. selaku dosen penguji.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar beserta staff administrasi Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang.
6. Staf karyawan dan karyawan keputastakaan dan staf administrasi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jasrul (Almarhum) dan Ibunda Yusmawarti terima kasih yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusannya mendampingi menyelesaikan skripsi ini.
8. Yuki Gustian, kakak tersayang yang selalu memberikan semangat, dorongan, kasih sayang serta do'a untuk saya.
9. Widi Yudelta, adik tersayang yang selalu memberikan semangat, dorongan, kasih sayang serta do'a untuk saya.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi.
11. Tania Rozanti, Wingfi Japami, Yeyen Oktaviani, yang sama-sama berjuang mendapatkan gelar sarjana.
12. Kak Yeni dan Intan P.S rekan srigunting 16 A cetar.
13. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Jurusan Administrasi Publik angkatan 2014, Universitas Negeri Padang.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, 05 Februari 2018

Penulis

Ratu Novia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Maksud dan Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
 BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Kinerja	13
B. Motivasi Kerja.....	15
C. Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	33
D. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan	48
E. Kerangka Konseptual	48
F. Penelitian yang Relevan	51
G. Hipotesis Penelitian	53
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
C. Operasionalisasi Variabel.....	54
D. Populasi dan Sampel Penelitian	57
E. Instrumen Penelitian.....	60

F. Jenis, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	61
G. Validitas dan Reliabilitas	62
H. Teknik Analisis Data	69

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	74
B. Temuan Khusus	83
C. Pembahasan	93
D. Keterbatasan Penelitian	101

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perangkat Nagari Kabupaten Tanah Datar.....	58
Tabel 2. Unit Sampling Penelitian.....	60
Tabel 3. Pengukuran Variabel	60
Tabel 4. Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja	63
Tabel 5. Uji Validitas Variabel Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan	64
Tabel 6. Uji Reliabelitas Variabel Motivasi Kerja.....	66
Tabel 7. Uji Reliabilitas Variabel Motivasi Kerja Secara Keseluruhan.....	67
Tabel 8. Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan	68
Tabel 9. Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Secara Keseluruhan	69
Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	77
Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	78
Tabel 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan	78
Tabel 13. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	79
Tabel 14. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.....	80
Tabel 15. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	81
Tabel 16. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Bersih.....	82
Tabel 17. Deskripsi Variabel Motivasi Kerja	83
Tabel 18. Deskripsi Variabel Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan	84
Tabel 19. Uji Linearitas Motivasi Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan	87
Tabel 20. Hasil Uji Autokorelasi Motivasi Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan.....	90
Tabel 21. Hasil Kontribusi(R) Motivasi Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan	91
Tabel 22. Hasil Uji Anova (F) Motivasi Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan	92
Tabel 23. Hasil Uji Regresi Sederhana.....	93

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual	50
Gambar 2. Struktur Organisasi Nagari Di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar	76
Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Motivasi Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan	86
Gambar 4. Hasil Uji Linearitas Motivasi Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan	88
Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Motivasi Kerja terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan Keuangan	89

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dalam setiap ketentuan perundangan-undangan yang mengatur pemerintahan pusat dan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan sebagai negara kesatuan, menurut pasal 18 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota, tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerahnya sendiri yang diatur dengan undang-undang. Daerah-daerah yang telah dibagi tersebut diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang disebut dengan azas otonomi daerah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan sarana pemerintah untuk melaksanakan renovasi administrasi di tubuh pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki praktek penyelenggaraan pemerintah di Indonesia (Irsyad, 2017:1). Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang- Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang baik harus didukung oleh semua pihak yang terkait, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal ini diperkuat oleh pendapat Soekidjo (2009:124) mengatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh dua faktor utama, mencakup sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kerja. Sumber daya tersebut seharusnya tidak dibiarkan saja tetapi harus dikelola secara

maksimal agar dapat menghasilkan sumber dana untuk daerah. Pengelolaan sumber daya alam yang maksimal harus didukung oleh sumber daya manusia (*stakeholder*) yang ada di daerah. Sebab *stakeholder* dalam organisasi pemerintah merupakan pelaku dan sebagai penentu keberhasilan tujuan organisasi tersebut.

Untuk kepentingan ini pemerintah antara lain telah mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari. Penyebutan nagari di Sumatera Barat sama halnya dengan penyebutan desa di daerah lain yang merupakan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penyebutan “nagari” di Sumatera Barat sesuai dengan azas otonomi daerah dan diatur dalam undang-undang, sebagaimana terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 pasal 1 tentang pemerintahan daerah, yaitu:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan lahirnya undang-undang tersebut, nagari sudah diakui menjadi salah satu bagian dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Undang-undang inilah yang menjadi rujukan bagi nagari dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemerintahan terdepan di republik ini.

Selanjutnya dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 71 tentang Desa berbunyi bahwa “Keuangan desa merupakan setiap hak dan kewajiban desa yang

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Sehubungan dengan itu, APB desa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa tentang APB desa. Perancangan APB desa ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal itu dilakukan melalui forum Musyawarah Desa/Nagari. Dalam forum itu masyarakat ikut serta menentukan arah pembangunan di nagari yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa. UU No 6 Tahun 2014 ini memberikan harapan baru kepada nagari dalam meningkatkan peran aparatur pemerintah nagari sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

Realisasi dari UU tentang Desa ini masih menyisakan beberapa keraguan dari berbagai pihak, sebab ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dialami desa/nagari, diantaranya yaitu masalah kesiapan para pejabat aparatur di pemerintahan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari, masalah penerapan dan penggunaan anggaran keuangan nagari, serta masalah peningkatan fungsi pelayanan masyarakat terhadap tingginya dana yang diperoleh untuk nagari. Sehubungan dengan itu, rencana pemerintah yang akan mengalokasikan anggaran 1 miliar tiap nagari setiap tahunnya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang Desa masih menimbulkan kekhawatiran pada efektivitas dan transparansi penggunaannya. Penyebabnya, dana sebesar itu akan sia-sia jika kesiapan aparatur dari pemerintah pusat hingga nagari tidak maksimal dalam pengelolaan keuangan nagari. Dalam hal kesiapan perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari maka perlunya motivasi kerja yang tinggi dari perangkat nagari serta didukung

dengan pelatihan yang dilakukan terhadap perangkat nagari sehingga perangkat nagari paham dalam pengelolaan keuangan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, bahwa pengelolaan keuangan nagari harus dilakukan dengan prinsip-prinsip atau azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa/nagari merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perangkat nagari mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan melakukan pertanggungjawaban keuangan nagari. Untuk meningkatkan potensi nagari dan aparaturnya dalam memahami kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari, maka perlu diadakan sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun oleh Pemerintah Nagari itu sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah N0. 47 Tahun 2015 menyatakan bahwa pengalokasian Belanja Desa/nagari yang ditetapkan dalam APB Desa/nagari digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa/nagari digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa/nagari, pelaksanaan pembangunan Desa/nagari, pembinaan kemasyarakatan Desa/nagari, dan pemberdayaan masyarakat Desa/nagari, dan paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa/nagari tersebut digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa/nagari dan perangkat Desa/nagari, operasional pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Permasalahan yang penulis temukan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wali Nagari Tanjuang pada tanggal 16 Oktober 2017 di Nagari Tanjuang Kecamatan Sungayang bahwa perangkat nagari kurang termotivasi dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh wali nagari. Hal ini terlihat dari lamanya proses penyelesaian tugas yang diberikan, sehingga tidak tercapainya tujuan dari pelaksanaan pemerintahan nagari tersebut. Selain itu, di sisi lain wali nagari Tanjuang antara lain juga menjelaskan bahwa perangkat nagari Tanjuang masih kurang memiliki kompetensi dan motivasi dalam pengelolaan keuangan nagari. Disamping itu pihak nagari sudah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan keuangan nagari yang tepat guna, dimana dalam mengikuti pelatihan tersebut perangkat nagari merasa tidak mengerti dengan apa yang sedang diikutinya dikarenakan materi pelatihan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari. Akibatnya setelah diadakan pelatihan tersebut perangkat nagari masih tidak paham bagaimana seharusnya pengelolaan keuangan di nagari sehingga dalam pengalokasian dana untuk nagari menjadi tidak tepat sasaran. Sehubungan dengan hal itu perangkat nagari yang mengikuti pelatihan dalam pengelolaan keuangan tidak memahami secara jelas materi pelatihan tersebut disebabkan juga karena waktu pelatihan yang diadakan hanya satu hari sehingga perangkat nagari yang mengikuti pelatihan tersebut menjadi tidak mengerti secara menyeluruh bagaimana pengelolaan keuangan nagari yang baik.

Hal yang sama juga diperkuat oleh informasi sekretaris nagari Minangkabau dalam wawancara tanggal 21 September 2017. Beliau menjelaskan bahwa

kurangnya motivasi perangkat nagari dalam menyelesaikan pekerjaannya dalam pengelolaan keuangan nagari terlihat dari lambatnya jam masuk kerja perangkat nagari Minangkabau, dimana jam kerja di Nagari Minangkabau dimulai pada pukul 09.00. Setelah sampai dikantor mereka lebih banyak duduk sambil membaca koran. Selain disebabkan oleh kurangnya motivasi kerja dari perangkat nagari juga disebabkan kurangnya kemampuan dari perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan tersebut, sehingga mereka belum mampu menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara baik. Kurangnya pelatihan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah juga dikeluhkan oleh pemerintah nagari Minangkabau karena nagari belum mampu memahami pengelolaan keuangan secara baik.

Selanjutnya Sekretaris Nagari Andaleh Baruah Bukik juga mengatakan bahwa Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) yang ada tidak berfungsi dengan baik. Sulitnya PTPKN dalam melaksanakan pekerjaannya karena mereka tidak mengerti tentang bagaimana melakukan kegiatan fisik baik menyusun RAB ataupun permasalahan lain yang menyangkut kegiatan fisik sehingga menyulitkan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari. Selanjutnya dalam hal pelatihan dalam pengelolaan keuangan, peserta yang diminta hanya bendahara dan sekretaris sementara yang bekerja dalam kegiatan pengelolaan keuangan nagari tersebut juga melibatkan kepala urusan yang ada di nagari sehingga hal ini jelas akan menyulitkan nagari dalam pengelolaan keuangan, karena para kepala urusan tidak dilibatkan dalam pelatihan.

Mangkunegara (2011:67) mengatakan bahwa yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*). Berdasarkan pendapat di atas bahwa motivasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam kinerja seseorang. Jika perangkat nagari tidak puas biasanya mereka mempunyai motivasi kerja yang rendah. Akibatnya dalam bekerja mereka biasanya kurang bersemangat, malas, lambat bahkan mereka bisa banyak melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan hal tersebut bahwa pada dasarnya sifat manusia bersumber dari adanya kebutuhan dan keinginan, dimana kebutuhan tersebut merupakan konsep dari motivasi yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan perangkat nagari dapat menimbulkan motivasi dalam melakukan pekerjaan dalam pengelolaan keuangan nagari. Karena tanpa motivasi kerja tinggi yang dimiliki perangkat nagari maka nagari tidak akan berhasil untuk menyelesaikan pekerjaan dalam pengelolaan keuangan nagari secara maksimal akibatnya dana untuk nagari yang diberikan oleh pemerintah tidak tersalurkan dengan baik.

Sehubungan dengan hal di atas bahwa faktor motivasi kerja perangkat nagari sangat menentukan keberhasilan suatu nagari dalam pengelolaan keuangan nagari, karena kecakapan sumberdaya yang mengelolanya akan menciptakan pengelolaan keuangan nagari tersebut menjadi lebih baik. Untuk melakukan tugas-tugasnya perangkat nagari harus memiliki motivasi yang tinggi dan dorongan yang kuat sehingga menghasilkan prestasi kerja yang tinggi bagi

perangkat nagari, termasuk dalam pengelolaan keuangan nagari. Hal ini diperkuat oleh pendapat Cepi (2015:92) yang mengatakan bahwa jika seseorang memiliki motivasi kerja yang baik dalam melakukan pekerjaan maka akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Oleh karena itu, agar setiap perangkat nagari mempunyai motivasi kerja yang tinggi, perlu bagi pemerintah atau pimpinan suatu daerah memberikan motivasi kepada para pegawainya. Pemberian motivasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemberian kompensasi, penghargaan, kesempatan untuk maju dan lain sebagainya. Betapa pun majunya teknologi, berkembangnya informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, namun jika tanpa sumber daya manusia maka akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Syamsir, 2014:59)

Berangkat dari masalah tersebut bahwa seharusnya perangkat nagari harus benar-benar tahu tentang tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan dan perangkat nagari harus memiliki motivasi kerja yang tinggi, sehingga dalam melakukan suatu pekerjaan perangkat nagari tidak harus menunggu instruksi dari pimpinan. Jadi diharapkan pimpinan juga harus mengerti yang dibutuhkan oleh bawahan serta mengetahui keinginan-keinginan yang membuat bawahan puas sehingga mereka memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja tidaklah mungkin mencapai hasil yang maksimal apabila tidak ada motivasi, karena motivasi merupakan suatu daya penggerak yang dimiliki oleh seseorang di dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu kinerja yang rendah juga disebabkan rendahnya

motivasi dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang Robbins dalam Harbani (2010:141)

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh suatu kekuasaan dalam diri orang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut motivasi. Sehubungan dengan itu seseorang yang memiliki kemampuan yang sedang-sedang saja relatif agak rendah namun jika disertai dengan motivasi yang tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan, maka sangat memungkinkan seseorang tersebut akan menunjukkan kinerja yang melebihi kinerja orang lain yang memiliki kemampuan tinggi yang memiliki motivasi yang rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih mendalam untuk menjawab persoalan yang terjadi dengan melakukan penelitian dalam sebuah skripsi dengan judul: **Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.**

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, selanjutnya penulis mencoba mengidentifikasikan masalah- masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya motivasi perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari pada Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

- b. Tidak berfungsinya dengan baik Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) yang ada di sebagian nagari di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, terutama dalam menyusun RAB.
- c. Kurang efektifnya pelatihan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan nagari pada Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.
- d. Kurangnya kemampuan perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis dan untuk mempertajam masalah penelitian maka penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini:

- 1. Bagaimana gambaran tingkat motivasi kerja perangkat nagari di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar?
- 2. Bagaimana kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar?

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan motivasi kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui gambaran tingkat motivasi kerja perangkat nagari di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaan keuangan nagari.
2. Mengetahui kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.
3. Membuktikan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan akademis, penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia dan administrasi

keuangan publik dalam mengkaji masalah-masalah motivasi kerja perangkat nagari dan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan nagari.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Perangkat nagari, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau pedoman dalam pengelolaan keuangan nagari.
- b. Peneliti, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar Sarjana Administrasi Publik.
- c. Sebagai masukan bagi peneliti lanjutan yang ada hubungannya dengan motivasi kerja perangkat nagari dan kinerjanya.